

BAB II

KONSEP MANAJEMEN HUMAS DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Penelitian Terkait

Peneliti menyadari bahwa secara substansial penelitian ini tidaklah sama sekali baru. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansinya dengan judul skripsi Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sekitar Sekolah Di Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Rembang. Untuk itu penulis melakukan penelaahan terhadap sumber berbagai bahan pertimbangan skripsi ini, beberapa karya itu antara lain :

1. Erlin Zulaikhah, 3105356 (Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam (KI) Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010) dalam tuangan karya penelitiannya yang berjudul "*Hubungan Manajemen Mutu Kehumasan Dengan Madrasah Aliyah Tajdil Ulum Tanggungharjo Grobogan*", Dari hasil temuannya penelitian ini adalah dengan adanya Manajemen Humas yang secara efektif dapat meningkatkan mutu di sekolah tersebut.¹¹
2. Athi' Rohmanah, 063311024 (Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam (KI) Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010) "*Implementasi Manajemen Humas pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi di SMA Ungaran Nurul Islami Wonologo Mijen Semarang)*". Dari hasil temuannya penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan dan penerapan Manajemen Humas pada lembaga pendidikan tersebut.¹²

¹¹ Erlin Zulaikhah, *Hubungan Manajemen Mutu Kehumasan Dengan Madrasah Aliyah Tajdil Ulum Tanggungharjo Grobogan*, (Semarang: Perpus IAIN Walisongo Semarang, 2010).

¹² Athi' Rohmanah, *Implementasi Manajemen Humas pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi di SMA Ungaran Nurul Islami Wonologo Mijen Semarang)*, (Semarang: Perpus IAIN Walisongo Semarang, 2010).

Berdasarkan skripsi di atas berbeda, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan tentang Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sekitar Sekolah Di Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Rembang, guna mencapai sebuah sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

B. Tinjauan Tentang Manajemen Humas

1. Pengertian Manajemen Humas

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda manajemen dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.¹³

Adapun pengertian manajemen menurut Miller, sebagaimana yang dikutip oleh Sufyarma. M, mengemukakan tentang manajemen sebagai berikut: "*Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired goal*". Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa manajemen pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan bersama dan dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan.¹⁴

Humas (Hubungan Masyarakat) yang merupakan terjemahan bebas dari istilah *Public relation* atau bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya. Sedangkan menurut definisi kamus terbitan *Institute Of Public Relation (IPR)* yakni sebuah lembaga Humas

¹³ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 3.

¹⁴ H. Sufyarma. M, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 189.

terkemuka di Inggris dan Eropa, Humas adalah keseluruhan upaya yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya.¹⁵ Jadi, humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Kegiatan humas sama sekali tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau dadakan. Tujuan humas itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa niat baik dan kiprah organisasi yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan (atau lazim disebut sebagai seluruh "khalayak" atau publiknya).

Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menilai sikap masyarakat agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijaksanaan organisasi. Karena mulai dari aktivitas program humas, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi tidak terlepas dari dukungan, serta kepercayaan citra positif dari masyarakat. Pada prinsipnya secara struktural fungsi humas dalam organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi. Fungsi kehumasan dapat berhasil secara optimal apabila berada langsung di bawah pimpinan tertinggi pada organisasi tersebut. Fungsi manajemen humas dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik dua arah organisasi yang diwakilinya dengan masyarakat sebagai sasaran pada akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang hendak dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan intisari definisi kerja humas.

Manajemen hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik (masyarakat) secara timbal balik dalam

¹⁵ M. Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 1.

rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama serta pemenuhan kepentingan bersama.¹⁶

Humas dalam pengertian umumnya merupakan serangkaian alat untuk promosi sebagai penunjang bagian yang terpenting dalam meningkatkan suatu lembaga pendidikan, dan memiliki fungsi manajemen yang berlangsung secara terus menerus dan dirancang melalui organisasi-organisasi masyarakat, lembaga yang berusaha menjalin dan memelihara saling pengertian peraturan dan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk kepentingan bersama.¹⁷

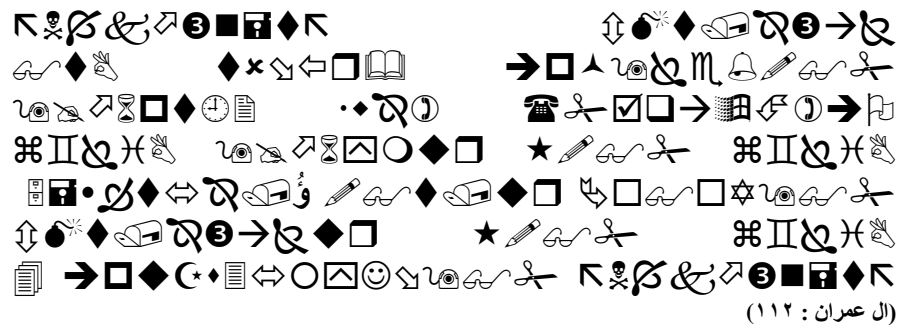
Dalam Islam istilah humas belum ada pengertian secara spesifik. Hubungan masyarakat masih merupakan bangunan yang belum mendapat proporsi kajian yang menggembirakan, sehingga definisi humas dalam islam secara spesifik belum ditemukan. Namun demikian bukan berarti islam tidak menyadari pentingnya humas, Islam menyadari bahwa usaha untuk mencapai kebahagiaan (*al-sa'adah*) tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus bersama dengan yang lain atas dasar saling menolong (*al-ta'awun*) dan saling melengkapi. Kondisi demikian menurut Masykawih akan tercipta apabila sesama manusia saling mencintai. Setiap pribadi merasa bahwa kesempurnaan dirinya akan terwujud karena kesempurnaan yang lain.

Agama Islam mengatur bukan saja amalan-amalan peribadatan apalagi sekedar orang dengan Tuhan-nya, melainkan juga perilaku orang dalam berhubungan dengan sesama dan dunianya.¹⁸ Dalam Al-Qur'an, istilah tersebut ditegaskan dengan *hablun min Allah* dan *hablun min al-nas*, yang tercantum pada surat Ali Imron ayat 112, yang berbunyi:

¹⁶ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), hlm. 119.

¹⁷ Hamdan Ada'an dan Hafied Cangara, *Prinsip-Prinsip Hubungan Masyarakat*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), hlm. 17.

¹⁸ M. Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 82.



”Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan sesama manusia.. (Qs. Ali Imron ayat 112).¹⁹

Sedangkan dalam sebuah Hadits Rasulullah saw. Menggambarkan bahwa hubungan antar sesama muslim adalah bagaikan suatu bangunan yang satu komponen dengan yang lainnya saling memperkokoh, dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. متفق عليه.

”Dari Abi Musa r.a., Rasulullah saw. Bersabda: Hubungan orang mu’min dengan mu’min yang lain bagaikan bangunan yang saling memperkokoh/menguatkan satu sama lain.” (HR. Muttafaq ‘alaih).

Orang Islam adalah seperti sebuah bangunan yang saling melengkapi/menguatkan.²⁰ Atas dasar itu maka setiap individu menjadi salah satu bagian dari yang lainnya. Manusia menjadi kuat karena kesempurnaan anggota-anggota badanya. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kondisi yang baik dari luar dirinya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berbuat baik kepada keluarga dan orang-orang yang masih ada kaitan dengannya, mulai dari saudara, anak yatim atau orang lain yang ada hubungannya.

Peran manajemen humas itu dapat bertindak sebagai tanda bahaya yang berperan untuk mendukung atau membantu pihak manajemen

¹⁹ Prof. R.H.A. Sunaryo, S.H, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 94.

²⁰ Jami’us Shoghir, (Beirut: Darul Kutub), Juz IV, hlm. 287.

pendidikan berjaga-jaga menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi terhadap lembaga pendidikan. Mulai dari timbulnya isu, berita negatif, meluasnya isu negatif yang kurang menguntungkan terhadap lembaga pendidikan atau nama lembaga yang sedang bermasalah hingga penurunan citra, bahkan kehilangan citra yang dapat menimbulkan berbagai resiko yang menyangkut krisis kepercayaan maupun krisis manajemen.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas manajemen humas pendidikan akan menjalankan perannya yaitu kepentingan menjaga nama baik dan citra lembaga pendidikan agar selalu dalam posisi yang menguntungkan. Salah satu metode yang dipergunakan adalah melalui cara, ajakan atau imbauan, bukan merupakan paksaan. Biasanya manajemen humas akan melaksanakan strategi komunikasi yang lebih jelas.

Jadi peran ideal yang harus dimiliki oleh manajemen humas dalam suatu lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tujuan-tujuan organisasi kepada pihak masyarakatnya. Tugas tersebut akan terpenuhi dengan baik apabila manajemen humas yang bersangkutan lebih memahami atau meyakini informasi yang akan disampaikannya itu.
- b. Bertindak sebagai radar, tetapi juga harus mampu memperlancar pelaksanaannya jangan sampai informasi tersebut membingungkan atau menghasilkan sesuatu yang kadang-kadang tidak jelas arahnya sehingga informasi menjadi sulit untuk di terima oleh masyarakat.
- c. Pihak manajemen humas memiliki kemampuan untuk melihat ke depan atau memprediksi suatu secara tepat yang didasarkan kepada pengetahuan akan data atau sumber informasi *actual* dan *factual* yang menyangkut kepentingan lembaga pendidikan maupun masyarakatnya.²¹

2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Humas

²¹ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, hlm. 123.

Fungsi atau aktivitas atau suatu kegiatan dari organisasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menentukan struktur kerjanya atas dasar kebutuhan-kebutuhan dalam mencapai tujuan.²² Pada dasarnya fungsi manajemen humas, tidak jauh berbeda dengan fungsi-fungsi manajemen secara umum. Fungsi-fungsi ini sangat mengait dengan tujuan manajemen humas, di mana tujuan itu sendiri adalah suatu hasil akhir, titik akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai.

Fungsi Humas itu sendiri adalah membantu manajemen dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dan mengembangkan hubungan yang baik dengan berbagai macam publik.²³

Fungsi atau dalam bahasa Inggris *function*, bersumber pada perikatan bahasa Latin, *function*. *Function* yang berarti penampilan, perbuatan, pelaksanaan, atau kegiatan. Ralph Curries David dan Allan C, Filley dalam bukunya, *Principies of management*' mengatakan bahwa istilah fungsi menunjukkan suatu tahap pekerjaan yang jelas yang dapat dibedakan, bahkan kalau perlu dipisahkan dari tahap pekerjaan lain.

Dalam kaitannya dengan Humas, maka Humas dalam suatu instansi dikatakan berfungsi apabila Humas itu menunjukkan kegiatan yang jelas. Yang dapat dibedakan dari kegiatan lainnya, jadi kalau dipertanyakan apakah humas itu berfungsi, dalam arti kata apakah menunjukkan kegiatan dan apakah kegiatan itu jelas dan berbeda dari kegiatan lainnya.

Dalam konsepnya fungsi humas adalah sebagai berikut:

- a. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.
- b. Membina hubungan masyarakat yang harmoni antara organisasi dengan *public intern* dan *public ekstern*.

²² H. Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2000), hlm. 46.

²³ Drs. Deddy Djamiluddin Malik, *Humas Membangun Citra dengan komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), cet. kedua, hlm. 13.

- c. Menciptakan kombinasi dua arah dengan penyebaran informasi dan organisasi kepada *public* dan menyalurkan opini *public* dan menyalurkan opini *public* kepada organisasi.
- d. Melayani *public* dengan menasehati pimpinan organisasi dengan kepentingan umum.²⁴

Mengenai tujuan hubungan sekolah dan masyarakat, T Sianipar (1984, dalam Purwanto, 1995: 189-190) meninjaunya dari sudut kepentingan kedua lembaga tersebut, yakni kepentingan sekolah dan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk:

- a. Memelihara kelangsungan hidup sekolah.
- b. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
- c. Memperlancar proses belajar mengajar.
- d. Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.

Sedangkan ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, tujuan hubungannya dengan sekolah adalah untuk:

- a. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang mental spiritual.
- b. Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- c. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya.²⁵

Menurut E. Mulyasa, tujuan utama yang ingin dicapai dengan mengembangkan kegiatan Humas adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan sekolah, meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan serta aspirasi

²⁴ H. Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, hlm. 20.

²⁵ Mulyono, MA., *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), Cet. 3, hlm. 211-212.

masyarakat tersebut terhadap sekolah, meningkatkan usaha orang tua siswa dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik serta meningkatkan kuantitas serta kualitas bantuan orang tua siswa dalam kegiatan pendidikan sekolah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam memajukan pendidikan di sekolah dalam era pembangunan, terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah, pertanggungjawaban sekolah atas harapan yang dibebankan masyarakat kepada sekolah, dukungan serta bantuan dari masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program sekolah.²⁶

Dengan adanya hubungan masyarakat diharapkan terjadi saling pengertian, akibatnya memunculkan sikap kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pihak sekolah untuk menanggulangi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Jadi pada dasarnya dari pengertian fungsi dan tujuan pokok humas yang disebutkan di atas pada umumnya menarik simpati masyarakat sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap sekolah tersebut, yang pada akhirnya menambah *income* bagi sekolah yang bermanfaat bagi bantuan terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

3. Manajemen Humas

a. Perencanaan

Sebelum merumuskan program sekolah perlu mengetahui secara pasti seperti apa citra sekolah di mata masyarakat. Hal ini identik dengan prinsip militer yang harus senantiasa dipegang teguh dalam setiap pertempuran. Kemenangan tidak mungkin dicapai jika situasinya tidak dipahami dengan benar. Untuk memahami situasi memerlukan informasi kalau mendasarkan segala sesuatunya hanya

²⁶ Dr. E. Mulyasa, M.Pd., *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. 3, hlm. 178.

pada dugaan, perkiraan atau bahkan angan-angan saja. Maka bisa dipastikan bahwa akan kehilangan arah dan program tadipun mengalami kegagalan. Kegiatan humas yang sebenarnya tidaklah berupa perekayasaan atau pemolesan publik guna memunculkan suatu citra yang lebih indah dari aslinya.

Adapun kegiatan humas yang sebenarnya senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Segala program humas baik itu program yang berjangka panjang maupun program yang berjangka pendek harus direncanakan dengan cermat dan hati-hati sedemikian rupa sehingga akan diperoleh hasil-hasil yang nyata.²⁷

Adapun alasan-alasan diadakannya perencanaan humas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menetapkan target-target operasi humas yang nantinya akan menjadi tolak ukur atau segenap hasil yang diperoleh.
- 2) Untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang dibutuhkan.
- 3) Untuk memilih prioritas-prioritas yang paling penting guna menentukan:
 - a) Jumlah program.
 - b) Waktu yang diperlukan guna melaksanakan segenap program humas yang telah diprioritaskan tersebut.
- 4) Untuk menentukan kesiapan atau kelayakan pelaksanaan berbagai upaya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan jumlah dan kualitas.
 - a) Personal yang ada.
 - b) Daya dukung dari berbagai peralatan fisik seperti: alat-alat kantor, dsb.
 - c) Serta anggaran dana yang tersedia.

²⁷ Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 75.

Kata-kata yang paling penting diingat di sini antara lain adalah jam kerja, prioritas, penentuan waktu, sumber daya, peralatan, dan anggaran.

Dalam mengejar suatu tujuan kita selalu saja menghadapi hambatan abadi yang berupa keterbatasan sumber daya. Tanpa adanya suatu program yang terencana, kegiatan humas terpaksa beroperasi secara *instingtif* sehingga mudah kehilangan arah akan selalu tergoda mengerjakan hal-hal yang baru sementara hal-hal yang lama belum terselesaikan. Pada akhirnya ia akan sulit memastikan sejauh mana kemajuan yang telah dicapai, dan apa saja hasil-hasil konkret yang telah dibuahnya. Ini sama saja dengan menjalankan sebuah kereta api tanpa arah tanpa halte dan tanpa stasiun tujuan sehingga pada akhirnya ia akan kehabisan bahan bakar dan berhenti tanpa mencapai suatu hasil yang pasti. Biasanya pola kerja seperti itulah yang dilakukan oleh para praktisi humas yang kurang profesional.²⁸

Perencanaan merupakan proses pemilihan alternatif dan proses mengaitkan pengetahuan, fakta, imajinasi dan asumsi masa depan, serta formulasi tujuan yang ingin dicapai, perencanaan merupakan proses di mana mengadaptasi dirinya dengan berbagai sumber untuk mengubah lingkungan dan kekuatan-kekuatan internal yang ada di dalam sistem itu sendiri.²⁹

Pada dasarnya tujuan umum dari program kerja dan berbagai kerja humas di lapangan adalah cara menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan dengan masyarakatnya atau *stake holder* sasaran masyarakat yang terkait. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya citra positif, kemauan baik, saling menghargai, saling timbul pengertian, toleransi antara kedua belah pihak.

Tujuan dari proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas manajemen humas tersebut dapat diwujudkan jika

²⁸ Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan*, hlm. 76.

²⁹ Endang Soenaryo, *Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya 2000), hlm. 36-37.

terorganisasi dengan baik melalui manajemen humas yang dikelola secara profesional dan dapat di pertanggungjawabkan hasil atau sasarannya. Hal tersebut dapat terwujud jika keduanya mendapatkan informasi yang jelas, serta mudah dimengerti oleh keduanya.

Secara umum pengertian dari perencanaan humas yaitu terdiri dari semua bentuk kegiatan perencanaan, wujud rencana kerja dan alasan dilakukannya perencanaan kerja humas.

Manfaat perencanaan manajemen humas antara lain yaitu :

- 1) Mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerja sama antara pihak yang terkait.
- 2) Mengefisienkan waktu, tenaga, upaya, dan biaya.
- 3) Menghindari resiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas atau konkret .
- 4) Mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi, pelaksanaan, komunikasi, target, dan sasaran yang hendak dicapai di masa mendatang.
- 5) Menetapkan klasifikasi rencana strategis sesuai dengan kebijakan jangka panjang, rencana tetap yang dapat dilakukan berulang-ulang dan rencana tertentu.

Sebelum membentuk perencanaan manajemen humas harus terlebih dahulu memahami tujuan yang ingin dicapai oleh organisasinya.³⁰ Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Perencanaan sering juga disebut jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Meskipun keadaan masa depan yang tepat itu sukar diperkirakan karena banyak faktor di luar penguasaan manusia yang berpengaruh terhadap rencana, tetapi tanpa perencanaan humas kita akan menyerahkan keadaan pada masa yang akan datang

³⁰ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, hlm. 139-140.

itu pada kebetulan-kebetulan. Itulah sebabnya diadakannya perencanaan humas sebagai suatu proses intelektual yang menentukan secara sadar tindakan yang akan ditempuh.

Dan mendasarkan keputusan-keputusan pada tujuan yang hendak dicapai, informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya, serta memperhatikan keadaan yang akan datang, oleh karena itu, perencanaan humas membutuhkan pendekatan rasional ke arah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk itu, perencanaan humas membutuhkan data dan informasi agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Dengan demikian perencanaan humas hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan datang, di mana keputusan dan tindakan efektif dilaksanakan. Itulah sebabnya berdasarkan kurun waktu dikenal perencanaan tahunan atau perencanaan jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.³¹

b. Pengorganisasian

Untuk mencapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, diperlukan kerja sama antara semua anggota organisasi, proses ini disebut pengorganisasian.

Pengorganisasian adalah proses pembagi kerja dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikannya sumber

³¹ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 49-50.

daya, mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.³²

Secara singkat kupasan Ernest Dale dapat diartikan bahwa pentingnya pengorganisasian adalah :

- 1) Tugas-tugas yang terinci harus dibuat dalam mencapai tujuan organisasi.
- 2) Seluruh tugas-tugas harus dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dan sesuai bagi individu maupun kelompok.
- 3) Pekerjaan-pekerjaan anggota organisasi harus dikombinasikan secara logis dan efisien.
- 4) Perlunya pengendalian dan pengawasan untuk meningkatkan efektifitas.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi; sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Pembagian kerja adalah pemerincian tugas agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Tehnik pengorganisasian adalah usaha sadar yang dilakukan oleh suatu organisasi, dengan menggunakan daya analisis untuk menelaah kelemahan-kelemahan dalam keefektifan dan koordinasi organisasi.³³

Organisasi dalam arti statis adalah suatu bagan atau suatu bentuk yang berwujud dan bergerak demi tercapainya tujuan bersama, dalam istilah lain disebut sebagai struktur atau tata raga organisasi. Jadi struktur organisasi adalah suatu manifestasi organisasi yang menunjukkan hubungan antara fungsi otoritas dan tanggung jawab

³² Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, hlm. 71.

³³ Dydiet Hardjito, *Teori Organisasi Dan Teknik Pengoorganisasian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 74-79.

yang saling berinteraksi dari orang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas semua aktivitas.

Pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif di antara pekerja. Dan pengorganisasian juga dapat didefinisikan sebagai suatu pekerjaan pembagi tugas, mendelegasikan otoritas, dan menetapkan aktivitas yang hendak dilakukan oleh manajemen humas. Oleh karena itu, dalam pengorganisasian diperlukan tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas tertentu.
- 3) Klasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis.³⁴

c. Pengaktifan

Setelah setiap personalia mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab, tibalah saatnya pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini disebut pengaktifan. Pengaktifan adalah kegiatan menggerakkan semua personalia agar melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengaktifan bisa juga disebut penggerakan *actuating*, pemimpinan *leading*, atau pengarahan *directing*. Penggerakan dimaksudkan sebagai upaya untuk membuat semua anggota kelompok mau bekerja dan bersedia mengembangkan segenap pikiran dan tenaganya untuk membuat semua anggota kelompok mau bekerja dan bersedia mengembangkan segenap pikiran dan tenaganya untuk melakukan tugas pekerjaannya dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Penggerak atau pemotivasian pengaktifan yaitu dapat diartikan sebagai ke adaan kejiwaan dan sikap mental yang memberikan energi mendorong kegiatan, atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai

³⁴ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 73-75.

kebutuhan yang memberi keseimbangan secara singkat, pengaktifan sebagai penggerak semua potensi dan sumber daya lainnya agar secara produktif berhasil mencapai tujuan.³⁵

d. Pengendalian

Pengendalian yang dimaksudkan menentukan bagi pengajar apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus mereka kerjakan, dan pengajar harus mengerjakan hal-hal yang telah diinstruksikan. Dan juga mengukur hasil kerja dan campur tangan apabila hasil yang dicapai para guru kurang memuaskan. Pengendalian dalam suatu bentuk jelas perlu untuk mendapatkan kinerja yang tepercaya dan terkoordinasi.³⁶

Dalam pengendalian mengukur ke arah tujuan tersebut dan memungkinkan untuk dideteksi penyimpangan dari perencanaan dengan tepat pada waktunya untuk melakukan tindakan perbaikan sebelum penyimpangan menjadi jauh. Pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya lembaga pendidikan yang sedang digunakan dapat memungkinkan secara lebih efisien dan efektif guna mencapai tujuan pendidikan

Sebagai bahan perbandingan ada batasan pengendalian sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi apakah aktivitas organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila belum dilaksanakan didiagnosis faktor penyebabnya untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan.

³⁵ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, hlm. 119.

³⁶ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, hlm. 125.

Berdasarkan batasan di atas, tampaklah betapa pentingnya aktivitas pengendalian, kebutuhan pengendalian sama pentingnya dengan kebutuhan perencanaan. Aktivitas perencanaan sebagai kunci awal pelaksanaan aktivitas organisasi sedangkan aktivitas pengendalian sebagai kunci akhir untuk evaluasi aktivitas yang telah dilaksanakan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila perlu.

C. Konsep Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Sekolah dan masyarakat merupakan dua komunikasi yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, bahkan ikut memberikan warna terhadap perumusan model pembelajaran tertentu di sekolah oleh suatu lingkungan masyarakat tertentu pula. Sekolah berperan dalam melestarikan dan memindahkan nilai-nilai kultur pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama yang dianut para guru dan peserta didiknya kepada generasi penerus dan menjamin kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan sosial dengan menjadi pelaku aktif dalam perbaikan masyarakat. Sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat, bahkan sekolah tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.³⁷

Masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tiada bandingannya bagi satuan pendidikan. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa kasus yang muncul ke permukaan, bahwa satuan pendidikan yang tutup dan tidak meneruskan program-program pendidikannya karena tidak mendapat dukungan dari masyarakatnya.

Oleh karena itu hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi yang harmonis. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengertian masyarakat akan kebutuhan dan kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Dengan mengetahui kebutuhan dan kegiatan sekolah tersebut, masyarakat terdorong untuk bersedia bekerja sama dalam

³⁷ Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), Cet. 2. hlm. 234.

upaya meningkatkan dan mengembangkan kuantitas tetapi tetap mengacu pada kualitas.³⁸

Dalam penyelenggaraan pendidikan, peran serta masyarakat sangat penting, sebagai salah satu elemen pendukung terwujudnya pendidikan berbasis masyarakat sehingga, manfaat kehadiran pendidikan benar-benar dirasakan masyarakat. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat berhak melaksanakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dan pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lainnya. Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan sedangkan komite sekolah adalah lembaga yang terdiri dari unsur orang tua, komunitas, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dalam tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Sedangkan peningkatan

³⁸ Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, hlm. 235.

mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan dan peran tersebut menjadi tanggung jawab komite sekolah.³⁹

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik ke sekolah. Dalam hal ini sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat.

Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk memberikan penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah.

Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain: (1). Memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak, (2). Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, dan (3). Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah masyarakat. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

³⁹ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multi Kultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 61-62.

Hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat ini semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Namun tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya pendidikan, hubungan kerja sama ini tidak perlu dibina. Pada masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan, sekolah dituntut lebih aktif dan kreatif untuk menciptakan hubungan kerja sama yang lebih harmonis.

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar terjadi hubungan dan kerja sama yang baik antar sekolah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi sekolah ini dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua murid, buletin bulanan kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah murid, laporan tahunan.⁴⁰

Lembaga pendidikan selalu mengadakan kontak hubungan dengan lingkungannya yang disebut sebagai supra sistem. Kontak hubungan ini dibutuhkan untuk menjaga agar sistem atau lembaga itu tidak mudah punah atau mati. Hanya sistem terbuka yang memiliki usaha terus menerus untuk menghalangi kemungkinan terjadinya kepunahan.

Sekolah yang tidak punya nama baik di mata masyarakat dan akhirnya mati, adalah sekolah yang tidak mampu membuat hubungan baik dengan masyarakat pendukungnya. Sebaliknya sekolah yang mampu mengadakan kontak hubungan dengan masyarakatnya akan bisa bertahan lama, malah akan bisa maju terus.

Untuk mencapai akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat, komunikasi perlu terjalin dengan sebaik mungkin, sebab dengan informasi yang diperoleh melalui komunikasi, masyarakat dan sekolah berusaha untuk saling terbuka satu sama lain. Melalui hal itu tercipta transparansi yang memberikan kepada sekolah kerangka akuntabilitas yang baik. Transparansi

⁴⁰ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, hlm. 50-51.

dan akuntabilitas pada gilirannya akan melahirkan rasa saling percaya. Rasa saling percaya akan timbul manakala perilaku masing-masing pihak bisa diprediksi oleh pihak lain. Untuk bisa diprediksi oleh pihak lain, kedua belah pihak harus bersikap terbuka dan jujur. Sikap terbuka dan jujur inilah yang kemudian melahirkan sikap saling percaya.

Sikap saling percaya akan membuat hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi harmonis. Keharmonisan ini, jika bisa dipertahankan dalam waktu lama akan membuahkan rasa saling memiliki *sense of belonging* masyarakat terhadap sekolah. Jika masyarakat sudah merasa memiliki sekolah, maka masyarakat pun akan merasa ikut bertanggung jawab terhadap sekolah. Dengan demikian, maka dukungan masyarakat baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk yang lain akan lebih mudah diperoleh sekolah.

Untuk bisa menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah, sekolah mesti sebanyak mungkin menjalin komunikasi dengan masyarakat. Untuk bisa menghasilkan komunikasi yang efektif, yang berupa saling pengertian dan hubungan yang semakin baik, maka sekolah perlu:

1. Bersikap terbuka dan jujur terhadap masyarakat melalui jalinan komunikasi timbal balik yang saling menghargai.
2. Mampu menyerap aspirasi masyarakat tentang pendidikan yang diharapkan masyarakat.
3. Berusaha untuk memahami keadaan masyarakat, baik dari segi sosial budaya maupun ekonomi masyarakat.
4. Menerjemahkan kondisi masyarakat tersebut melalui program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.⁴¹

Dengan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah, komunikasi sekolah dalam rangka kerja sama sekolah dengan masyarakat akan menjadi lebih lancar. Kerja sama antara sekolah dengan masyarakat memang terlihat belum maksimal. Bentuk kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan bisa bermacam-macam, baik berbentuk materi maupun dalam

⁴¹ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.

bentuk non material. Bentuk non materi misalnya aktifnya anggota masyarakat dalam kelembagaan komite sekolah melalui pemberian saran dan ide-ide tentang pengembangan sekolah. Sedangkan dalam bentuk materi bisa berupa sumbangan masyarakat kepada sekolah.

Kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan memerlukan kesadaran masyarakat akan arti penting peran mereka dalam peningkatan kualitas pendidikan. Untuk menghasilkan kerja sama dan tingkat partisipasi yang tinggi, pertama kali sekolah harus menyadarkan masyarakat akan peran mereka dalam pembangunan pendidikan. Setelah kesadaran itu tercapai, sekolah mesti melakukan komunikasi secara lebih intensif dengan masyarakat agar kesadaran masyarakat berbuah dukungan. Untuk itu manajemen hubungan sekolah masyarakat perlu dikelola dengan lebih baik.

Elemen masyarakat yang perlu didekati untuk melakukan kerja sama dan berpartisipasi dalam pengembangan sekolah adalah komite sekolah. Komite sekolah adalah representasi dari warga sekolah yang terdiri dari perwakilan guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan warga masyarakat. Sebagai representasi dari warga sekolah, komite sekolah mempunyai kepentingan terhadap pengembangan sekolah, karena itu sangatlah wajar bila mereka diajak untuk bekerja sama membangun sekolah.

Komunikasi mempunyai makna yang luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem atau organisme. Kata komunikasi sendiri dipergunakan sebagai proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh.

Pada saat pesan sampai pada diri komunikator, psikologi melihat ke dalam proses penerimaan pesan, menganalisa faktor-faktor personal, dan situasional yang mempengaruhinya, dan menjelaskan berbagai corak komunikasi ketika sendirian atau kelompok.⁴²

Peran serta masyarakat dalam pendidikan diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (UUSPN) pasal 54, yaitu:

⁴² Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, hlm. 5.

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Secara spesifik, pada pasal 56 undang-undang sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah yang berperan:

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri di bentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.⁴³

⁴³ Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 85-86.